

Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah

ARI KRISTIN PRASETYONINGRUM

**Progdi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo
Jln. Prof. Dr. Hamka Km. 2, Ngaliyan, Semarang 50185
email : ari.kristin@yahoo.com**

Diterima 4 Juli 2009; Disetujui 28 Desember 2009

***Abstract** : Shari'a financial institution in Indonesia has shown fast development including one of them is Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Development of BPRS which is so fast brings concerns related to the purity of BPRS on shari'a principles so Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) is formed. Realizing the importance of the role of DPS as a profession which can make public sure that service of BPRS followed by syari'a principles, so independence and professionalism of DPS is needed in their duties. This research examined the effect of economics and religious factor to the DPS independency so that effected the professionalism of DPS that would increase the performance of BPRS in Central Java. This research was quantitative that describes the level of eksplanative causality variables. The data obtained by using questionnaire sent to all BPRS in Central Java. Measurement of variables using Likert scale, while an analysis tool used path analysis. Conclusion in this research is that economics and religious factor have a significant effect on the independence of DPS on BPRS in Central Java, DPS independency has a significant effect on professionalism of DPS with negative relation, DPS professionalism doesn't significantly effect the Performance of BPRS and both of DPS independency and DPS professionalism doesn't significantly effect the performance of BPRS.*

***Keywords**; BPRS, Independency, Economics, religiosity, professionalism, and performance*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat selama dekade terakhir ini. Disamping adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif umat Islam yang besar, lembaga keuangan syari'ah terbukti secara empiris tetap bertahan dalam kondisi krisis ekonomi yang telah memporakporandakan sendi-sendi ekonomi dan sosial masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syari'ah yang memiliki potensi yang cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999, bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPRS merupakan

lembaga keuangan berbentuk bank dengan system operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah.

BPRS sebagai lembaga keuangan Syari'ah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, di mana pada tahun 2007 mencapai 109 BPRS dengan total asset Rp. 1, 1,123 triliun atau mencapai 4 persen dan diprediksikan pada tahun 2008 meningkat di atas 5 persen dari pangsa pasar BPR nasional (BI, 2007). Di Jawa Tengah pada tahun 2006 terdapat 8 BPRS sedangkan pada tahun 2007 menjadi 13 BPRS atau naik sebesar 62,5 persen.

Perkembangan BPRS yang begitu pesat membawa kekhawatiran tersendiri. Kekhawatiran tersebut berhubungan dengan kemurnian BPRS dari prinsip-prinsip syari'ah. Lebih lanjut Antonio (1999) menjelaskan bahwa untuk menjaga kemurnian praktik bank syari'ah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Adanya DPS ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara BPR dengan BPRS. Tugas DPS yang utama adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syari'ah. DPS ini dibentuk dengan rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang dibentuk sejak tahun 1997 sebagai lembaga syari'ah tertinggi yang mengayomi dan mengawasi operasional kesyari'ahan lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia (Prabowo, 2000).

Menyadari pentingnya peran DPS sebagai suatu profesi yang dapat menjadikan masyarakat ataupun nasabah lebih yakin untuk tetap menggunakan jasa BPRS, maka independensi dan profesionalisme DPS sangat diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena DPS merupakan kepercayaan masyarakat, maka anggota DPS dituntut untuk tidak memihak siapapun (independen), bersifat objektif dan jujur. Independensi DPS pada dasarnya bersumber dari kebutuhan untuk memberi kredibilitas bagi suatu laporan operasi bank syari'ah. Kebutuhan ini untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan operasional BPRS supaya mereka yakin bahwa tidak terjadi pelanggaran syari'ah dalam operasional BPRS.

Hasil penelitian Bank Indonesia juga memberikan rekomendasi kebijakan bahwa kualitas pemahaman prinsip-prinsip syari'ah dalam transaksi perbankan sangat vital untuk meningkatkan keyakinan masyarakat akan *profesionalisme* DPS sebagai kunci untuk menjamin bahwa kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syari'ah. Untuk menjadi DPS yang profesional, seseorang harus memiliki kumpulan pengetahuan yang berlaku umum dalam pengawasan atau audit yang dipandang penting sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam area yang cukup luas dengan hasil kerja yang memuaskan sesuai dengan standar keprofesionalan DPS.

TINJAUAN TEORETIS

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Untuk memastikan bahwa operasional BPRS telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka BPRS harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu dewan pengawas syariah (DPS).

Dewan pengawas syariah merupakan institusi independen dalam BPRS yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional BPRS. Tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah dalam BPRS memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqih maupun undang-undang perbankan di Indonesia. Dewan pengawas syariah merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di BPRS, karena di luar negeri DPS disebut juga sebagai shari'a supervisory board (SSB).

Pengertian DPS menurut Arifin (2005:106) adalah badan independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah termasuk BPRS. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Sedangkan pengertian DPS menurut Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 1 ayat

10 menyatakan dewan pengawas syariah merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas maka DPS merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah dan BPRS.

DPS merupakan unit yang hanya dimiliki oleh perusahaan/organisasi yang dijalankan sesuai syari'ah Islam. Laporan DPS untuk meyakinkan bahwa operasi, transaksi, bisnis lembaga keuangan itu dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam (Harahap, 2002). Keanggotaan Dewan Pengawas Syari'ah ini seharusnya terdiri dari ahli syari'ah, yang sedikitnya banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis (Prabowo, 2000).

Harahap (2002) memberikan definisi DPS sebagai lembaga Independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat (*fiqh almuamalat*). Namun DPS bisa juga anggota diluar fikih tetapi ahli juga didalam bidang lembaga keuangan Islam dalam fikih muamalat. DPS merupakan suatu lembaga keuangan yang berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam, fatwa anggota DPS akan mengikat lembaga keuangan Islam.

Independensi DPS. Karim (1990) menyatakan bahwa ada sejumlah persamaan mendasar antara peran DPS dan akuntan publik. Keduanya mengeluarkan laporan yang memverifikasi laporan keuangan yang secara wajar hasil operasi organisasi. DPS menjamin apakah aktivitas operasional bank, seperti yang dicerminkan dalam laporan keuangan, adalah sesuai syari'ah sedangkan auditor eksternal mengkonfirmasi apakah laporan keuangan tersebut adil (*fair*) tentang posisi keuangan bank dan hasil aktivitasnya. Keduanya DPS dan akuntan publik harus dinilai independen oleh para pemakai laporan supaya kredibilitas laporan yang mereka keluarkan tidak mendapatkan keraguan.

Novianty dan Kusuma (2001) menyatakan

bahwa independensi akuntan publik mencakup dua aspek yaitu independensi sikap mental dan independensi penampilan. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif, tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sedangkan independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dalam hal ini DPS dituntut untuk bersikap independen baik secara mental maupun penampilan.

Karim (1990) juga menyatakan bahwa sifat independensi DPS memfokuskan pada kesetiaan institusi terhadap ajaran Islam untuk komitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang Islami, sehingga diharapkan tidak tergantung pada tekanan dari manajemen. Tentu saja, kesanggupan untuk nilai-nilai religius dan kewajiban religius merangsang anggota DPS untuk mandiri. Pada sisi lain, tidak berarti bahwa ketegangan antara manajemen dan DPS tidak mungkin ada. Tentu saja, ini mungkin berlangsung jika manajemen cenderung untuk memberi penekanan lebih dari aspek finansial ekonomi dibandingkan aspek religius.

Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah (DPS). Profesional adalah tingkat penguasaan dan pelaksanaan terhadap *knowledge, skill, dan character*. Seorang yang profesional akan mempunyai tingkat tertentu pada ketiga bidang tersebut (Bernardi, 1994:68). Perilaku profesional diperlukan bagi semua profesi, agar profesi yang telah menjadi pilihannya mendapat kepercayaan dari masyarakat (Bonner and Lewis, 1990).

Profesionalisme sebagai sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Ia menyebutkan bahwa seorang yang profesional, di samping mempunyai keahlian dan kecakapan teknis, harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan

kesatuan pikiran, kata dan perbuatan (Christian, 1994).

Karim (1990) menyatakan bahwa ada sejumlah persamaan mendasar antara peran DPS dan akuntan publik, sehingga teori-teori profesionalisme akuntan publik (auditor) dapat menjelaskan profesionalisme seorang DPS. Dimensi profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968) banyak dilakukan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor intern yang tercermin dari sikap dan perilaku. Hall (1968) menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara sikap dan perilaku, yaitu perilaku profesionalisme adalah refleksi dari sikap profesionalisme dan demikian sebaliknya. Kelima dimensi profesionalisme Hall (1968) adalah afiliasi komunitas (*Community affiliation*), kebutuhan untuk mandiri (*Autonomy demand*), keyakinan terhadap peraturan sendiri / profesi (*Belief self regulation*), dedikasi pada profesi (*Dedication*) dan kewajiban sosial (*Social obligation*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip profesionalisme Sawyer (2003) yang dapat dikelompokkan menjadi lima indikator yaitu indikator: afiliasi komunitas; sertifikasi; pendidikan profesi lanjutan; dedikasi pada profesi; dan kewajiban sosial profesi. Mengacu pada penelitian Bernardi (1994), Sawyer (2003), dan penelitian Hall (1968), dapat diperkirakan bahwa meningkatnya profesionalisme seorang DPS akan meningkatkan independensi dan hasil kerja DPS. Dengan kata lain independensi mempengaruhi profesionalisme dan hasil kerja DPS.

Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penelitian adalah *fee* yang diterima DPS. Profesi sebagai anggota DPS akan memperoleh *fee* dari pekerjaannya tersebut. Yang dimaksudkan dengan DPS "*fee*" disini adalah pembayaran yang diperoleh anggota DPS sebagai imbalan atas jasa pemeriksaan BPRS terhadap ketaatan operasional bank terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang dilakukannya. Karena DPS bekerja pada BPRS dan pekerjaannya tersebut merupakan sebuah profesi maka bisa jadi profesi DPS ini merupakan pekerjaan pokoknya dan *fee* yang diperoleh DPS ini akan

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sehari-hari.

Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu terkait dengan kondisi psikologisnya (Khoirunissa, 2002). Jika seseorang melakukan suatu kegiatan ekonomi, seperti bekerja maka motivasi yang mendorongnya melakukan kegiatan itu bisa bersifat ekonomis. Anggota DPS memperoleh *fee* dari pihak manajemen bank yang memperkerjakannya, walaupun yang posisinya sebagai anggota DPS adalah merupakan rekomendasi dari DSN.

Faktor Religiusitas. Dalam studi keagamaan sering dibedakan antara religi (agama) dengan religiusitas. Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari. Keberagaman (religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia (Titik & Unti, 2002). Dalam pernyataan pertama etika Islam adalah supaya manusia mempunyai perilaku yang baik mengikuti ajaran Islam bagi mencapai keredhaan Allah. Agama mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena agama meletakkan dasar konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama (Azwar, 1998).

Menurut Glock dan Stark, ada lima dimensi religiusitas yaitu keyakinan (*the ideological dimension, religious belief*), peribadatan atau praktik agama (*the ritualistic dimension, religious practice*), penghayatan (*the experiential dimension, religious feeling*), pengamalan (*the consequential dimension, religious effect*), dan pengetahuan agama (*the intellectual dimension, religious knowledge*). Acok dan Suroso membagi Islam menjadi lima aspek yaitu aspek iman, aspek Islam aspek ihsan, aspek ilmu dan aspek amal. Sedangkan Nashori (1998) membagi agama Islam dalam lima dimensi yaitu dimensi akidah (iman atau ideologi), dimensi ibadah (ritual), dimensi amal (pengamalan), dimensi ihsan (penghayatan) dan dimensi ilmu (pengetahuan).

Dalam hadist lain Rasulullah juga bersabda: “Dari Ibn Umar ra, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Agama Islam dibangun atas lima unsur, yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mengerjakan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas (agama Islam) dapat dibagi menjadi lima dimensi yaitu (a) dimensi akidah, menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para Nabi dan sebagainya, (b) dimensi ibadah, menyangkut frekuensi intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya shalat, zakat, haji dan puasa, (c) dimensi amal, menyangkut tingkah laku dalam kehidupan masyarakat, misalnya menolong orang lain, membela yang lemah, bekerja dan sebagainya, (d) dimensi ihsan menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan, takut melanggar larangan dan lain-lain, dan (e) dimensi ilmu, menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama.

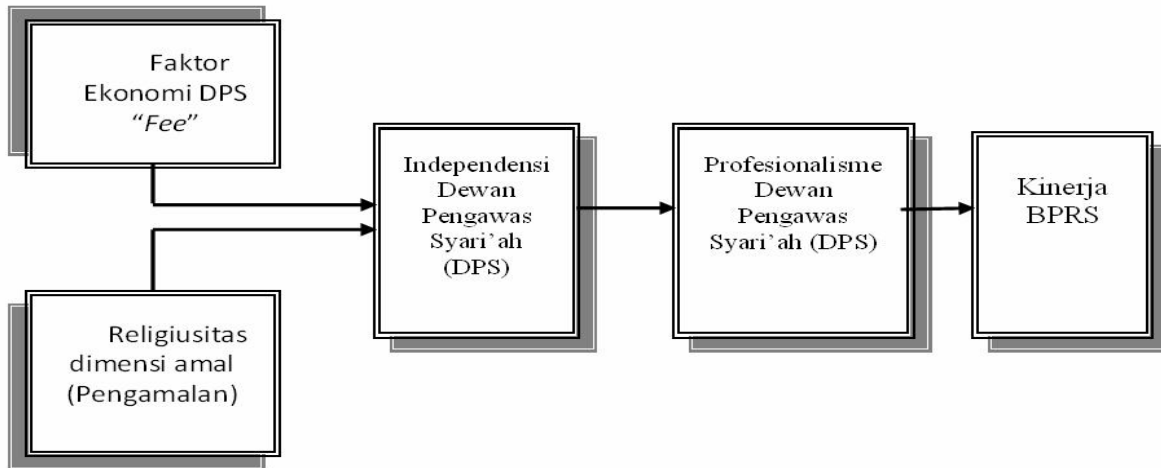
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Hawkins (The Oxford Paperback Dictionary, 1979) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut “*Performance is: the process or manner of performing, a notable action or achievement, the performing of a play or other entertainment*”. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan penilaian kinerja, dan penilaian sering diartikan dengan kata *assessment*.

Dalam penelitian terdahulu, penilaian kinerja suatu lembaga keuangan syari’ah, banyak peneliti menggunakan rasio keuangan yang dikategorikan seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan efisiensi.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah (BPRS) merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengurus bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Hasil penilaian tingkat kesehatan digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam rangka menerapkan strategi pembinaan dan pengembangan yang tepat bagi BPRS. Selanjutnya, tingkat kesehatan digunakan oleh BPRS sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bank ke depan.
2. Tingkat kesehatan BPRS merupakan hasil penilaian komposit atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu BPRS. Penilaian tingkat kesehatan BPRS tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai risiko, serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
3. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS, sedangkan penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



- Hipotesis 1:** Faktor ekonomi dan religiusitas berpengaruh terhadap independensi DPS.
Hipotesis 2: Independensi DPS berpengaruh terhadap profesionalisme DPS
Hipotesis 3: Profesionalisme DPS berpengaruh terhadap Kinerja BPRS.
Hipotesis 4: Independensi dan Profesionalisme DPS berpengaruh terhadap Kinerja BPRS

4. Rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisa faktor keuangan dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama merupakan rasio yang menjadi dasar terhadap penilaian faktor keuangan, rasio penunjang merupakan rasio yang akan mempengaruhi penilaian faktor keuangan sedangkan rasio pengamatan (*observed*) merupakan rasio yang dapat digunakan sebagai satu pertimbangan tambahan dalam penilaian akhir atas faktor keuangan.

Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari: *Permodalan (capital)*, *Kualitas aset (Asset quality)*, *Rentabilitas (Earnings)*, *Likuiditas (Liquidity)* dan *Manajemen (Management)*.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagaimana gambar 1.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tingkat eksplanatif yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat dari

sejumlah variabel yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode sensus dengan kuesioner. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Hipotesis diuji dengan menggunakan path analysis dengan bantuan program komputer *SPSS 16.00 for Windows*. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan alat path analysis untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara simultan. Sedangkan analisis parsial pada masing-masing variabel independen dan dependen digunakan untuk menerima atau menolak H_1 , H_2 , H_3 dan H_4 .

HASIL & PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan 42 kuisisioner kepada Dewan Pengawas Syari'ah dan Direktur/Manajer/Pimpinan dari BPRS Syari'ah. Kuisisioner dikirimkan secara langsung dan dikirimkan sendiri oleh peneliti sebanyak 42 kuisisioner kepada responden di wilayah Jawa Tengah. Pengiriman kuisisioner mulai dilakukan pada tanggal 7 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2009, dan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 kuisisioner yang sudah direspon responden

Tabel 1
Rincian Penerimaan dan Pengembalian Kuesioner

No	Nama BPRS	Kota/kabupaten	Pimpinan	DPS
1	Artha Leksana	Banyumas	1	1
2	Artha Amanah Ummat	Ungaran	1	1
3	Artha Mas Abadi	Pati	1	3
4	Artha Surya Barokah	Semarang	1	3
5	Asad Alif	Kendal	1	2
6	Ben Salamah	Grobogan	1	3
7	Bina Amanah Satria	Banyumas	1	3
8	Buana Mitra Perwira	Purbalingga	1	3
9	Bumi Artha Sampang	Cilacap	1	2
10	Ikhsanul Amal	Kebumen	1	2
11	Khasanah Ummat	Banyumas	1	3
12	PNM Binama	Semarang	1	2
13	Suriyah	Cilacap	1	1
Total			13	29

sebanyak 39 kuesioner, sedangkan sisanya tidak mendapatkan respon dari responden.

Dari data responden, tampak bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi adalah DPS sebanyak 66,7% dan Manajer/Direksi yang mewakili pimpinan BPR syariah sebanyak 33,3%, sedangkan responden pria sebanyak 38 (97,4%) dan responden wanita hanya satu responden (2,6%). Berdasarkan usia, responden yang berusia di antara 30 – 39 tahun (12,8%), usia 40 – 49 tahun 12 responden (30,8%), 50 – 59 dan lebih dari 59 tahun masing-masing ada 11 responden (28,2%). Ditinjau dari tingkat pendidikan responden yang terbesar adalah SLTA sebesar 5,1% (2 responden), sarjana (S1) sebesar 66,7% (26 responden) dan sisanya berpendidikan pasca-sarjana (S2/S3) sebanyak 11 responden (28,2%).

Berdasarkan statistik deskriptif variabel faktor ekonomi secara rata-rata adalah 5,49 dengan penyimpangan 2,16. Nilai minimal 2 dan nilai maksimal 9. Dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwa faktor ekonomi dipersepsikan rendah oleh responden. Variabel faktor religiusitas mempunyai nilai minimal 8 dan nilai maksimal 10 dengan rata-rata 8,90 dan penyimpangan 0,55. Nilai ini menunjukkan bahwa responden mem-persepsikan religiusitas anggota DPS

sangat tinggi. Variabel independensi DPS mempunyai rata-rata 8,41 dengan penyimpangan sebesar 0,96 menunjukkan bahwa rata-rata persepsi responden terhadap independensi DPS adalah sangat tinggi. Variabel profesionalisme DPS menunjukkan rata-rata 5,92 menunjukkan bahwa profesionalisme DPS cenderung dipersepsikan rendah oleh responden. Variabel kinerja BPRS menunjukkan rata-rata 4,85 dengan nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5. Dengan skala likert 5 point, hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPRS tinggi.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja ke 13 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah menggunakan 4 (empat kriteria) kriteria dari pedoman Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 antara lain aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas. Namun karena adanya keterbatasan data yang diperoleh dari Bank Indonesia Semarang, maka peneliti menggunakan aspek pemodal (CAR), rentabilitas (ROE) dan likuiditas (CR).

Penggolongan kinerja keuangan didasarkan pada rasio-rasio struktur permodalan, rentabilitas dan likuiditas. Caranya dengan menghitung dari neraca dan laporan laba-rugi BPRS dan memberi skor dan bobot sehingga dapat dilihat

tingkat kesehatan kinerja keuangan BPRS dengan predikat sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan tidak baik. Dari analisis data menunjukkan bahwa penyebaran tingkat kesehatan kinerja keuangan BPRS yang tergolong sangat baik sebanyak 11 BPRS atau 84,62%, sedangkan yang tergolong baik sebanyak 2 BPRS atau 15,38%. Tidak ada BPRS yang masuk katagori BPRS cukup baik, kurang baik dan tidak baik. Adapun penggolongan tingkat kesehatan BPRS dapat dilihat pada lampiran. Masuknya kebanyakan BPRS tergolong sangat baik bisa dimaklumi, sebab kontrol yang ketat dari Bank Indonesia sehingga BPRS yang mengalami kesulitan atau masalah akan cepat teratasi karena BPRS setiap bulan harus melaporkan keuangan ke BI serta jaringan yang online mempermudah BI menawasi operasional BPRS.

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi dengan tingkat signifikansi (α) 5%. Hasil regresi untuk uji hipotesis pertama menunjukkan adjusted R square sebesar 0,443 berarti 44,3% variabel dependen (independensi) bisa dijelaskan oleh variabel independen (faktor ekonomi dan faktor religiusitas), sedangkan sisanya 55,7 % dijelaskan oleh variabel lain. Nilai $F = 16,133$, dengan tingkat signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan religiusitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap independensi DPS. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa kedua independen variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap dependen variabel. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi persepsi independensi DPS.

Hipotesis kedua akan menguji apakah independensi DPS berpengaruh terhadap profesionalisme DPS. Hasil analisis regresi menunjukkan adjusted R square sebesar 0,54 berarti 54% variabel dependen (profesionalisme DPS) bisa dijelaskan oleh variabel independen (independensi DPS), sedangkan sisanya 46 % dijelaskan oleh variabel lain. Nilai $F = 52,692$, dengan tingkat signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa

independensi DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme DPS.

Hipotesis ketiga akan menguji apakah profesionalisme DPS berpengaruh terhadap kinerja BPRS. Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme DPS tidak signifikan dalam mempengaruhi kinerja BPRS. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan (H3). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga ditolak, karena hasil analisis statistik menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan.

Hipotesis keempat menguji apakah independensi dan profesionalisme DPS berpengaruh terhadap kinerja BPRS. Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa independensi DPS dan profesionalisme DPS tidak signifikan dalam mempengaruhi Kinerja BPRS. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan (H4). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat ditolak, karena hasil analisis statistik menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil analisis data dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPR Syari'ah di Jawa Tengah. Hasil uji statistik hipotesis ke dua menunjukkan bahwa independensi DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme DPS dengan arah hubungan negatif. Hasil uji statistik hipotesis tiga menunjukkan bahwa profesionalisme DPS tidak signifikan dalam mempengaruhi Kinerja BPRS. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga ditolak. Hasil uji statistik hipotesis empat menunjukkan bahwa independensi DPS dan profesionalisme DPS tidak signifikan mempengaruhi Kinerja BPRS. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan (H4). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat ditolak.

Implikasi. Penelitian ini, terlepas dari keterbatasan yang dimiliki diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam

praktek penerapan prinsip-prinsip syari'ah di BPR Syari'ah.

Hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur, minimal dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian dimasa yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian mendatang.

Keterbatasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang kemungkinan dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang mendasarkan pada persepsi jawaban responden yang mungkin dapat berubah pada waktu yang berbeda.
2. Penelitian ini hanya menerapkan metode survei kuesioner, peneliti tidak melakukan wawancara atau terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen tertulis (kuesioner).
3. Dalam penelitian ini jumlah responden yang ikut berpartisipasi masih sangat terbatas sehingga hasil penelitian tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institute, Jakarta.
- _____, 2000, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta.
- _____, 1999, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, Jakarta.
- _____, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Arrunada, B. 2000. Audit Quality: Attribut, Private Safeguards and The Role of Regulation. *The European Accounting Review*. Vol. 9. No. 2: 205-224.
- Bank Indonesia, 2000, "Ringkasan Pokok-pokok Hasil Penelitian "Potensi, Preferensidan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Pulau Jawa"", *Bank Indonesia Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan*.
- Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian Pembangunan Lembaga Penelitian Undip, 2000, "Penelitiann Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Jawa Tengah dan DIY", *Bank Indonesia Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan..*
- Barlow, Helberg Cs. 1995. *The Business Approach to Internal Auditing*. First Edition. Johannesburg, Juta & Co. Ltd.
- Benardi, R. 1994. Fraud Detection: The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitivie Style. *Auditing: A Journal of Theory & Practice*. Vol. 13 (Suplement): 68-84.
- Bonner, S. & B. Lewis. 1990. Dimensions of Auditors Expertise. *Journal of Accounting Research*. Vol. 28 Supplement: 1-20.
- Ghozali, Imam, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2002, "Pengaruh Religiositas Terhadap Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja, Kepuasan Kerja dan Produktivitas", *Jurnal Bisnis STRATEGI*, Vol. 9, Juli, Th. VII, p. 1-11.
- Hall, R. 1968. Profesionalization and Bureacratization. *American Sociological Review*. Vol. 33: 211-228.
- Harisman, 2002, "Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *www. Tazkia.com*, Kategori Bank Syariah, 28 Oktober.
- Hiro Tugiman. 1996. *Pengenalan Internal Audit*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hermawan, Sigit, 2002, "Peranan Akuntansi Syari'ah dalam Memberikan Landasan yang Kuat Terhadap Praktek Perbankan Syari'ah", *IKTISADIA*, Vol. 2, No. 2, p. 97-196.
- Ida Suraida. 2003. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman, Risiko Audit dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik (Survai terhadap para akuntan publik di Indonesia). *Disertasi*. Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD (Tidak Dipublikasikan).
- Idat, Dhani Gunawan, 2003, "Trend Bank Syari'ah : Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syari'ah", *Media Akuntansi*, Edisi 33, Mei, p. 30-31.

- _____, 2002, "Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan dan Prospek", *Tim Peneliti dan Pengembangan bank Syari'ah Direktorat Penelitian dan Pengembangan Perbankan*, p. 1 - 15.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Karim, Rifaat Ahmed Abdel, 1990, "The Independence of Religious and Eksternal Auditors: The Case of Islamic Bank", *JAAAJ*, Vol.3 No.3, p: 34-44.
- Kalbers, L.P. & T.J. Fogarty. 1995. Professional and Its Consequences: A Study Internal Auditor. *A Journal Practice and Theory*. Spring: 64-85.
- Ketchen & Strawser. 1998. Dalam Yohannes Sri Guntur, Bambang Soepomo, & Gitoyo. 2002. Analisis Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme dan Analisis Pengaruh Profesionalisme Terhadap Hasil Kerja (Outcomes). *Jurnal MAKSI*. Semarang: UNDIP.
- Khoirunissa, Delta, 2002, "Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syari'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syari'ah)", *Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*, p.127 – 161, Yogyakarta.
- Kreitner, Robert & Angelo Kinicki. 2001. *Organizational Behaviour*. Fifth Edition. The Mc Graw-Hill Companies, Inc.
- Morrow & Goetz (1988), Goetz, et. al. (1991) dalam Kalbers, L.P. & T.J. Fogarty. 1995. Professional and Its Consequences: A Study Internal Auditor. *A Journal Practice and Theory*. Spring: 64-85.
- Philip Gerrard dan J. Barton Cunningham, 1997, "Islamic banking: a study in Singapore", *International Journal of Bank Marketing*, p.204–216.
- Prabowo, Tommy, 2000, "Bank Syari'ah: Lahir dari Hasil Diskusi Kesadaran Umat Islam", *Media Akuntansi*, No.15, November-Desember, p.5-6.
- _____, 2000, "Menjaga Kemurnian Bank Syari'ah", *Media Akuntansi*, No. 15, November - Desember, p. 16 - 17.
- Qardawi, Yusuf, 2001, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta.
- Rahman, (2007) Analisis Hubungan individual Rank, Profesionalisme, Hasil Kerja auditor intern dan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Semarang, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang.
- Razak, Nasruddin, 1996, *Dienul Islam*, Cetakan ke 13, Al Ma'arif, Bandung.
- Robbins, Stephen P., 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Prenhallindo, Jakarta.
- Sabiq, Sayid, 1999, AQIDAH ISLAM, Cetakan XI, Penerbit cv. Diponegoro, Bandung.
- Samad Abdus and Dr M. Kabir Hassan, 1999, "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 1 No.3, p. 3 - 11.
- Sarker Mohammed Abdul Awwal, 1999, "Islamic Banking In Bangladesh: Performance, Problems & Prospects", *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1 No.3, p. 12-28.
- Sawyer, Lawrence B., Mortimer A. Dittenhofer, and James H. Scheiner. 2003. *Sawyer's Internal Auditing, The Practice of Modern Internal Auditing*. 5th Edition. Florida: The Institute of Internal Auditors. Altamonte Springs.
- Siregar, Mulya, 2002, "Agenda Pengembangan Perbankan Syari'ah dalam Mendukung Sistem Perekonomian yang Tangguh di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan", *Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*, p.597 – 619, Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Romy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta.
- Sudjana, 1992, *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga*, Transito, Bandung.
- Suharto, Harry, 2000, "Hadirnya Bank Syari'ah di Indonesia", *Media Akuntansi*, No. 15, November - Desember, p. 7 - 8.
- Supriyono, 1995, "*Pemeriksaan Akuntan : Faktor – faktor yang mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik, suatu hasil penelitian empiris di Indonesia*", BPFE, Yogyakarta.
- Syafei, A. Wirman, 2002, "Optimalisasi Pengawasan Dewan Syari'ah Nasional", *Media Indonesia*, Rabu 11 Desember.
- The Institute of Internal Auditors. 2000. *Kumpulan Makalah-Makalah Seminar International*. New York. 11-14 Juni.
- Yafie, Ali, 2000, "Umat Masih Awam dengan Bank Syari'ah", *Media Akuntansi*, Edisi November-Desember, VII, p. 15.
- Yusanto, Muhammad Ismail, 2002, "Menyoroti Kebijakan Perbankan Syari'ah dalam Konteks Mencari Solusi Alternatif Fundamental Krisis Moneter", *Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*, p.535 – 544, Yogyakarta.